

SKRIPSI

**POLITIK IDENTITAS DI KOTA MATARAM (STUDI PEMENANGAN
AHYAR ABDUH-MOHAN ROLISKANA DALAM PILKADA KOTA
MATARAM TAHUN 2015)**

Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata satu (S1)
Ilmu Pemerintahan Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram



OLEH:

SILMI SUSANTI
NIM. 216130076

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
MATARAM
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

POLITIK IDENTITAS DI KOTA MATARAM (STUDI PEMENANGAN

PASANGAN AHYAR ABDUH-MOHAN ROLISKANA DALAM

PILKADA KOTA MATARAM TAHUN 2015)



Di Susun Dan Diajukan Oleh:

SILMI SUSANTI
216130076

PROGRAM STUDI
ILMU PEMERINTAHAN

Telah dipriksa dan disetujui untuk diuji pada ujian skripsi

Mataram, 03 Januari 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Daramansyah, M.Si
NIDN. 0008075914

Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP
NIDN. 0816057902

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan



Ayaulah Hadi, S.IP., M.IP
NIDN. 0816057902

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

**POLITIK IDENTITAS DI KOTA MATARAM (STUDI PEMENANGAN
PASANGAN AHYAR ABDUH-MOHAN ROLISKANA DALAM
PILKADA KOTA MATARAM TAHUN 2015)**

Di Susun Dan Di ajukan Oleh

Silmi Susanti



**NIM. 216130076
PROGRAM STUDI
ILMU PEMERINTAHAN**

Telah dipertahankan dalam ujian skripsi pada tanggal : 03 Januari 2020 dan
dinyatakan memenuhi syarat kelulusan

Tim Penguji

- | | |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| 1. <u>Drs. H. Darmansyah., M.Si</u>
NIDN. 0008075914 | Penguji I (.....) |
| 2. <u>Ayatullah Hadi., S.IP.,M.IP</u>
NIDN. 0816057902 | Penguji II (.....) |
| 3. <u>Dr. H. Muhammad Ali., M.Si</u>
NIDN. 0806066801 | Penguji III (.....) |

Mengetahui,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan.



Dr. H. Muhammad Ali., M.Si
NIDN. 0806066801

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya mahasiswi program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Muhammadiyah Mataram, menyatakan bahwa:

Nama : Silmi Susanti

Nim : 216130076

Alamat: Batuyang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur

Memang benar skripsi yang berjudul Politik Identitas Di Kota Mataram (Studi Pemenangan Pasangan Ahyar Abduh-Mohan Roliskana Dalam Pilkada Kota Mataram Tahun 2015) adalah asli karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik di tempat manapun.

Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan bimbingan. Jika terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah di publikasikan, memang diacu sebagai sumber dan dicantumkan dalam daftar pustaka

Jika dikemudian hari pernyataan saya ini terbukti tidak benar, saya siap mempertanggungjawabkannya, termasuk meninggalkan gelar keserjanaan yang saya peroleh. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar tanpa tekanan dari pihak manapun.

Mataram, 3 Maret 2020

Yang membuat pernyataan



216130076



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SILMI SUFANTI
NIM : 216130076
Tempat/Tgl Lahir : Batayang, 27 Desember 1997
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Politik
No. Hp/Email : 085338969861
Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Politik Identitas di Kota Mataram (Studi Pemenangan
Abyar Abadi - Mohan Kulkarna dalam Pilkada Kota Mataram
2015)

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 28 10 / 2020

Penulis



NIM. 216130076

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat

Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Silmi Suciati

NIM : 216130076

Tempat/Tgl Lahir : Batuyang, 27 Desember 1997

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Politik

No. Hp/Email : 085338969861

Judul Penelitian : - Politik Identitas di Kota Mataram

(Studi pemewangan Ahyar Abdul-Moham Badiqara pada tahun 2015)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. *U/S*

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari karya ilmiah dari hasil penelitian tersebut terdapat indikasi plagiarisme, saya **bersedia menerima sanksi** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 28/02/2020

Penulis



NIM. 216130076

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.

NIDN. 0802048904

MOTTO

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah kamu berharap.”

(Q.S. Al-Insyirah, ayat 5 – 8)

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(Q.S. Al-Baqarah, ayat 286)





*Karya sederhana ini penulis persembahkan untuk
Bapak, Ibu, Malik, Faiz, Fatin, dan keluarga besar tercinta*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobil'alamin. Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul *“Politik Identitas Di Kota Mataram (Studi Pemenangan Ahyar Abduh-Mohan Roliskana Dalam Pilkada Kota Mataram Tahun 2015”*. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah, Muhammad SAW.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak baik berupa saran, bimbingan maupun petunjuk serta bantuan dalam bentuk lain. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Suaen dan Ibu Dewi Sriwiyanti, serta adik penulis, Malik Amrullah, Faiz Mubarak, Fatin Annisa, dan keluarga tercinta yang selalu memberikan doa, perhatian, semangat dan motivasi yang tiada batasnya demi kelancaran penyelesaian skripsi ini. Terimakasih untuk doa, kasih sayang, dan dukungannya selama ini.
2. Bapak Dr. H. Arsyad Abd Gani, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bapak Ayatullah Hadi., S.IP., M.IP selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram.
5. Bapak Drs. H. Darmansyah, M.Si selaku Dosen Pembimbing Utama skripsi yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan memberikan banyak saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP selaku Dosen Pembimbing Kedua skripsi yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan memberikan banyak saran dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Seluruh dosen, khususnya program studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Mataram, yang telah memberikan banyak ilmu yang sangat berharga bagi penulis.
8. Sahabat “Nia Haryati, Anisa Fatmawati, Dinda Nur Sahyasti, Endah Maharani, Dandi Bagaskara, Kurnia Ardiansyah” yang telah banyak memberikan perhatian, semangat, dan bantuan kepada penulis dalam penyelesaian proposal ini.
9. Team kos putri Almubarak khususnya “Mia Faradiani, Linda , Minda Karmila, Atika Fibri Nirmala, Putri, Baiq febrina isnaini, Dzikria, Ismi Milanda, Puspita” yang telah banyak memberikan perhatian, semangat, dan bantuan kepada penulis dalam penyelesaian proposal ini.
10. Teman-Teman Ilmu Pemerintahan B angkatan 2016 dan teman-teman angkatan tahun 2016 yang telah memberi banyak masukan, dukungan, dan doa kepada penulis.
11. Pihak-pihak lain yang belum sempat penulis sebutkan, yang telah membantu dalam penyelesaian proposal ini.

Akhir kata, penulis menyadari dan meyakini bahwa karya sederhana ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan penyusunan karya selanjutnya. Harapan penulis, semoga tesis ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan para pembaca.

Mataram, 04 Januari 2020

Penulis

ABSTRAK

POLITIK IDENTITAS DI KOTA MATARAM (STUDI PEMENANGAN PASANGAN AHYAR ABDUH-MOHAN ROLISKANA DALAM PILKADA KOTA MATARAM TAHUN 2015)

Oleh

Silmi Susanti
216130076

Penelitian ini berjudul “Politik Identitas Di Kota Mataram (Studi Pemenangan Pasangan Ahyar Abduh-Mohan Roliskana Dalam Pilkada Kota Mataram Tahun 2015)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui politik identitas di Kota Mataram dalam pemenangan Ahyar Abduh-Mohan Roliskana pada Pilkada Kota Mataram tahun 2015. Yang melatarbelakangi penelitian ini adalah kehidupan masyarakat Kota Mataram yang beranekaragam etnis dan agama mengakibatkan adanya berbagai pandangan politik yang berbeda-beda mengenai identitas sehingga hal tersebut sering digunakan sebagai alat politik.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan teknis analisis data yaitu Reduksi data, Penyajian data, dan Kesimpulan data. Sedangkan Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Primordialisme, Konstruktivisme, Instrumentalisme.

Hasil penelitian ini adalah dalam Pilkada Kota Mataram Tahun 2015 yang dimenangkan oleh pasangan Ahyar-Mohan dimana masih adanya penggunaan identitas agama dan etnik oleh pasangan calon maupun tim pemenang, sentimen agama dan etnis sengaja dibangun dengan berbagai cara untuk membangun politiknya seperti ajakan dan menunjukkan hasil kinerja pasangan calon, selain itu agama dan etnis juga di instrumenkan dengan berbagai cara yang dapat memobilisasi suara pemilih, seperti menggunakan baju kampanye dan menggunakan lagu, sehingga dapat mempengaruhi perilaku pemilih. Kesimpulannya adalah kemenangan pasangan calon Ahyar-Mohan menunjukkan masih adanya penggunaan identitas etnik dan agama, namun peran etnik dan agama relatif sedang karena masyarakat sudah bisa memilih secara rasional.

Kata kunci : Politik Identitas, Pemenangan Ahyar Abduh-Mohan Roliskana, Pilkada Kota Mataram

ABSTRACT

POLITICAL IDENTITY IN MATARAM CITY (A STUDY OF WINNING OF AHYAR ABDUH-MOHAN ROLISAKANA COUPLE IN THE ELECTION OF MATARAM CITY IN 2015)

By

Silmi Susanti
216130076

This research is entitled “political identity in the City of Mataram (Study of winning the Ahyar Abduh-Mohan Roliskana couple in the Mataram City Election in 2015)”. This study aims to determine the identity politics in the city of Mataram in the victory of Ahyar Abduh-Mohan Roliskana in the Mataram City Election in 2015. The background of this research in the life of the people of Mataram City that are ethnically and religiously diverse, resulting in different political views regarding identity so it is often used as a political tool.

The method used in this research is a qualitative research. Method with data analysis techniques namely data reduction, data presentation, and data gathering. The theory used in this study is the theory primordialisme, theory konstruktivisme, and theory instrumentalisme.

The results showed that in the Mataram City Election in 2015 which was won by the Ahyar-Mohan couple there was still the use of religious and ethnic identity by the candidate pair and the winning team. Religious and ethnic sentiments are deliberately built in various ways to develop their politics, such as invitations and appointment of the results of the performance of the candidate pair. In addition religion and ethnicity are also instrumented in various ways that can mobilize voter vote, such as using campaign clothes and using songs, which can influence voter behavior. The conclusion is the victory of the candidate pair Ahyar-Mohan shows that there is still the use of ethnic and religious identity, but the role of ethnic and religious is relatively moderate because the people can choose rationally.

Keywords: Identity Politics, Winning Ahyar Abduh-Mohan Roliskana, Mataram City Election

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERNYATAAN BERSEDIA DIPUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TUNJAUAN PUSATAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu.....	8
2.2 Tinjauan Toritik.....	13
2.2.1 Identitas	13
2.2.2 Politik Identitas	16
2.2.3 Perilaku Pemilih	26
2.3 Kerangka Pemikiran	29
2.4 Definisi Konseptual	30
2.5 Definisi Oprasional.....	31

BAB III METODELOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian	32
3.2 Lokasi Penelitian	33
3.3 Jenis Data.....	33
3.3.1 Data Primer	33
3.3.2 Data Sekunder	34
3.4 Teknik Penentuan Narasumber.....	35
3.5 Teknik Pengumpuln Data	36
3.5.1 Observasi	36
3.5.2 Wawancara	37
3.5.3 Dokumentasi	37
3.6 Teknik Analisis Data	37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	39
4.1.1 Letak Geografis Kota Mataram	39
4.1.2 Kondisi Sosial Politik.....	41
4.1.3 Aspek Agama Di Kota Mataram	43
4.1.4 Aspek Budaya Di Kota Mataram	44
4.2 Politik Identitas Dalam Pemenangan Ahyar-Mohan Pada Pilkada Kota Mataram Tahun 2015.....	44
4.2.1 Partai Pemenangan Pasangan Calon Pada Pilkada Kota Mataram Tahun 2015.....	45
4.2.2 Data Rekapitulasi Perolehan Suara Sub Wilayah Pilkada Kota Mataram	46
4.2.3 Pengguna Hak Pilih.....	47
4.2.4 Data Hasil Rekapitulasi Pilkada Kota Mataram Tahun 2015	48
4.3 Konstruktivisme Politik Identitas	50
4.3.1 Penegasan Pilkada Sebagai Ajang Pertarungan Agama Dan Etnik ..	50
4.3.2 Upaya Membangun/Dibangunnya Politik Identitas Agama Dan Etnik	55
4.4 Instrumentalisme Politik Identitas	62

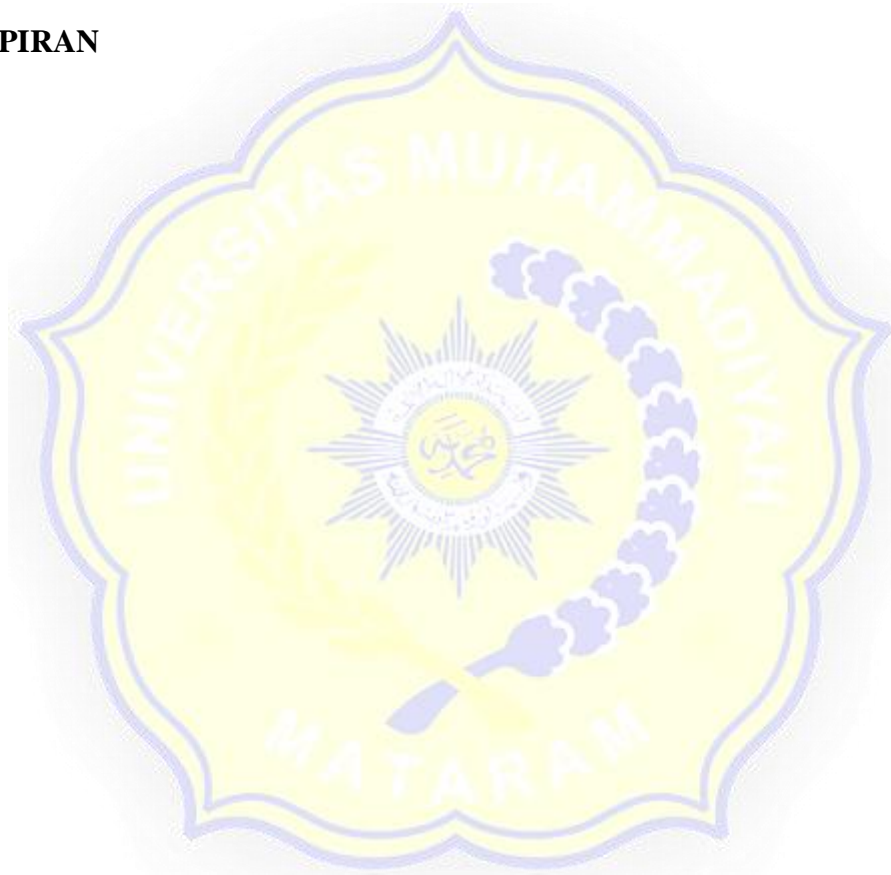
4.4.1 Agama Dan Etnik Menjadi Alat Pemenangan Pilkada Melalui Kampanye.....	63
4.4.2 Agama Dan Etnik Dimanfaatkan Untuk Memobilisasi Dukungan Untuk Pemenangan	67

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	75
5.2 Saran	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

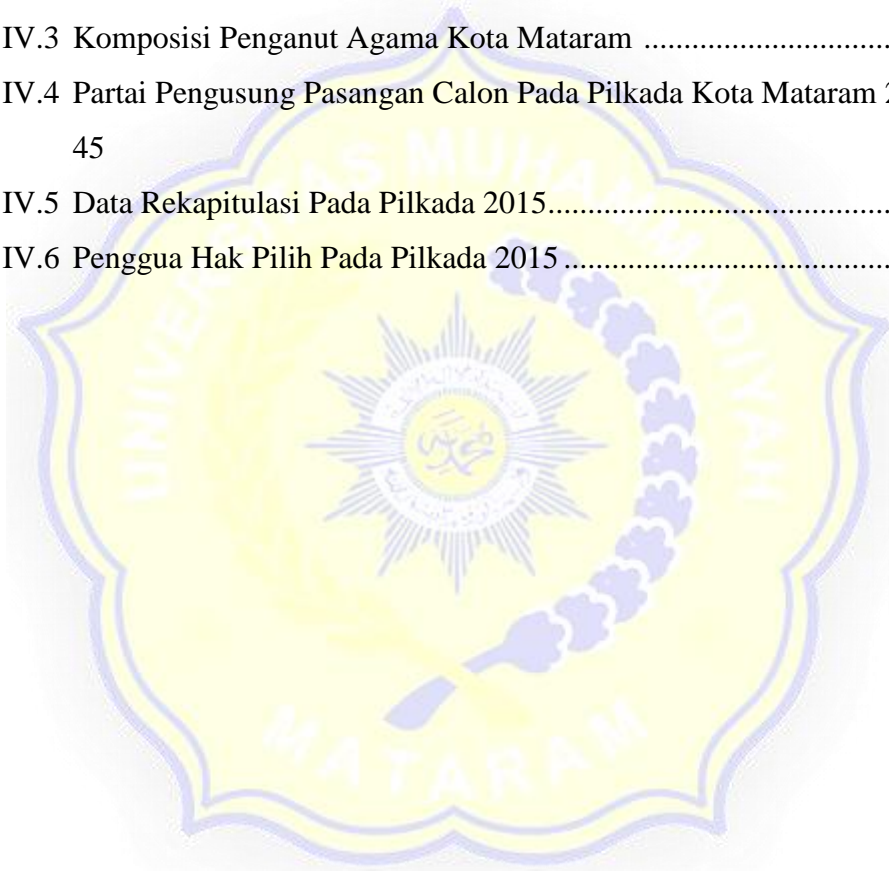


DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Pembagian Paradigma melihat politik identitas	22
Gambar II.2	Gambar Kerangka Pemikiran	29
Gambar IV.1	Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara	48
Gambar IV.2	Unggahan Meme Ajakan Memilih Pasangan Ahyar-Mohan dengan Menggunakan Bahasa Sasak.....	53
Gambar IV.3	Pernyataan Dalam Bentuk Status Oleh Relawan AMAN Dalam Media Sosial Facebook	58
Gambar IV.4	Potongan Gamba Menggunakan Sorban Dari Vidio Klip Lagu Kampanye Yang Berjudul Ahyar-Mohan	59
Gambar IV.5	Potongan Gambar Latar Masjid Dari Vidio Klip Lagu Kampanye Yang Berjudul Ahyar-Mohan.....	59
Gambar IV.6	Baju Dukungan Sentimen Agama dan Etnis Pasangan Ahyar-Mohan	65
Gambar IV.7	Potongan Gambar Menggunakan Baju Adat Dari Vidio Klip Lagu Kampanye Ahyar-Mohan Yang Berjudul Matur Tampiasih.....	70
Gambar IV.8	Potongan Gambar Menggunakan Sorban Dari Vidio Klip Lagu Kampanye Ahyar-Mohan Yang Berjudul Matur Tampiasih.....	70

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Penelitian Terdahulu	8
Tabel II.2	Definisi Oprasional	31
Tabel III.1	Unit Analisis Data Primer	34
Tabel III.2	Unit Analisis Data Sekunder	35
Tabel IV.1	Batas-Batas Wilayah Kota Mataram	39
Tabel IV.2	Jumlah Kelurahan Setiap Kecamatan Kota Mataram	39
Tabel IV.3	Komposisi Penganut Agama Kota Mataram	40
Tabel IV.4	Partai Pengusung Pasangan Calon Pada Pilkada Kota Mataram 2015 ... 45	
Tabel IV.5	Data Rekapitulasi Pada Pilkada 2015.....	46
Tabel IV.6	Penggua Hak Pilih Pada Pilkada 2015	47



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak Reformasi, Indonesia telah berhasil menyelenggarakan berbagai jenis Pemilihan Umum (Pemilu) secara berkala. Seperti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) telah berlangsung di tahun 2005, 2010 dan 2015. Sedangkan Pemilu Legislative (Pileg) DPD, DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota telah diselenggarakan sejak tahun 2005. Di tahun 2019, Indonesia telah menyelenggarakan Pilpres dan Pileg secara serentak untuk pertama kalinya.

Setelah mengalami goncangan dramatis pasca-reformasi, realitas demokrasi di Indonesia mengalami banyak perubahan dan peralihan. Bukan sesuatu yang mudah bagi bangsa Indonesia melewati transisi demokrasi yang demikian besar (*big bang transition*) hingga kemudian realtif memperlihatkan kemajuan. Langkah-langkah besar dan mendasar dilakukan untuk menjadikan demokrasi sebagai arah tujuan Negara dengan mengamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UU NRI 1945).

Amandemen UU NRI 1945 telah empat kali dilakukan selama 1999-2002. Amandemen tersebut mengubah sistem politik Indonesia secara prinsipil, di antaranya, Pilkada : tidak menentukan bahwa Pilkada itu tidak mutlak dipilih secara langsung tetapi undang-undang tentang pemerintah daerah menentukan mengenai pemilihan haruslah secara langsung semangat demokrasi yang terdapat dalam peraturan tersebut sehingga kepala daerah tidak lagi dipilih melalui DPRD

melainkan langsung dipilih oleh rakyat seperti halnya pemilihan presiden dan wakil presiden.

Meskipun Pemilu tidak sama dengan demokrasi, tetapi Pemilu adalah konsep dan sekaligus wujud nyata dari demokrasi *procedural*. Karena tidak ada satupun negara demokratis yang sepenuhnya dijalankan langsung oleh semua rakyat dan sepenuhnya untuk seluruh rakyat, maka Pemilu merupakan cara yang paling kuat bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam demokrasi perwakilan modern (*representative government*). Keikutsertaan masyarakat merupakan kunci utama dalam menjalankan sistem pemerintahan yang demokratis (Budiardjo, 2006).

Proses demokrasi di Indonesia merupakan proses demokrasi yang tidak terlepas dari orientasi identitas agama dan etnis. Hal ini dapat dilihat pada keikutsertaan partai-partai politik yang mengikuti Pilkada sebelumnya. Proses demokrasi, baik dalam Pilkada saja seringkali tidak terlepas dari peran serta beragam partai dengan berbagai ideologi yang ikut merongrong. Dalam Pilkada, berbagai ragam identitas agama dan etnis sering kali dijadikan sebagai alat politik.

Politik identitas dibedakan secara tajam antara identitas politik (*political identity*) dengan politik identitas (*political of identity*) (Haboddin, Muhtar, 2012). *Political identity* merupakan konstruksi yang menentukan posisi kepentingan subjek di dalam ikatan suatu komunitas politik sedangkan *political of identity* mengacu pada mekanisme politik pengorganisasian identitas (baik identitas politik maupun identitas sosial) sebagai sumber dan sarana politik. Politik identitas diasaskan pada esensialisme strategis, dimana kita bertindak seolah-olah identitas merupakan entitas yang stabil demi tujuan politis dan praktikal tertentu.

Politik identitas, khususnya agama memang tidak pernah sepi dalam gelanggang politik di Indonesia. Sebagai contoh, momentum pemilihan Gubernur Jakarta yang baru saja usai, membenarkan argumentasi bahwa memang identitas agama muncul menjadi sebuah kekuatan yang diamafaatkan oleh elite politik. Topik pertautan identitas agama dan negara di Indonesia sebenarnya bukanlah hal baru. Sejarah telah mencatat ketegangan ini sudah mulai terasa pada empat babakan era kenegaraan kita. Mulai dari masa sebelum kemerdekaan, orde baru dan pasca-reformasi yang ditunjukkan dengan menyeruaknya gerakan yang berbasis Islam dan upaya penegakan politik aliran sebagai hukum formal negara.

Di lain pihak, semakin menguatnya isu politik identitas mendapatkan perlawanan sebaliknya dari kelompok yang mengatasnamakan nasionalisme yang menjunjung tinggi segala macam perbedaan yang sejak awal telah diakui bersamaan dengan kemerdekaan yang diraih oleh Indonesia. Kelompok nasionalis yang didominasi oleh berbagai identitas kesukuan, agama, ras, adat-istiadat, dan lain-lain ini menjelma sebagai kelompok yang solid dalam menunjukkan eksistensinya.

Pertentangan antara identitas nasionalisme dan identitas agama saat ini semakin meruncing sehingga berpotensi mengganggu stabilitas negara. Perbedaan pandangan mengenai identitas politik tersebut melahirkan berbagai isu yang meluas di masyarakat berbagai daerah, karena hadirnya propaganda dan klaim antar kelompok terhadap kebenaran. Dalam rangka pemenangan kontestasi pemilu, elite politik menghadirkan isu politik identitas melalui kampanye yang tak lain bertujuan untuk memobilisasi dukungan massa. Sehingga alih-alih dukungan

yang diperoleh berdasarkan visi-misi para calon, dukungan masyarakat terhadap kandidat ditentukan oleh sentimen terhadap berbagai ragam perbedaan-perbedaan esensial berupa identitas agama dan etnik.

Pilkada 2015 menjadi bagian dari pemilihan umum diikuti oleh dua pasangan calon: Ahyar Abduh-Mohan Roliskana (selanjutnya : Ahyar-Mohan atau AMAN) dan Salman-Jana Hamdiana. Pasangan Ahyar-Mohan diusung oleh partai PKS, PKB, Partai Hanura, PAN, Partai Kesejahteraan dan Persatuan Indonesia, serta Partai Nasdem. Sementara pasangan Salman-Jana Hamdiana hanya diusung oleh Partai Golkar. Pilkada yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015 dimenangkan oleh pasangan Ahyar-Mohan dengan perolehan suara 77,27%, diikuti oleh Salman-Jana Hamdiana dengan perolehan suara 22,73%. (Sumber: <https://pilkada2015.kpu.go.id/>)

Dua pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang bertarung pada Pilkada 2015 tidak terlepas dari isu-isu politik di masyarakat sebagaimana yang terjadi pada Pemilu presiden 2014 lalu. Pasangan tersebut mewakili segmentasi dukungan dari konfigurasi identitas organisasi keagamaan tertentu dimana calon pemerintah daerah Petahanan Ahyar-Mohan sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah diharapkan dapat menepis isu berkaitan dengan identitasnya sebagai seorang ulama dan dukungan dari masyarakat organisasi keagamaan yaitu Nahdlatul Wathan sebagai representasi islam tradisional. Sementara pasangan Salman-Jana Hamdiana yang muncul pada tahap akhir pencalonan diharapkan mampu menepis isu sebagai pasangan boneka, dimana

pasangan ini ada hanya untuk mencegah terjadinya calon tunggal dan agar terlaksananya pesta demokrasi.

Penggunaan identitas agama oleh partai politik pendukung serta elite politik sebagai basis konfigurasi pencalonan Pilkada diharapkan mendapat insentif elektoral kepada pasangan calon. Sentimen keagamaan dalam segmentasi pemilih tertentu memang efektif untuk membentuk ceruk dukungan kepada para calon, alih-alih berdasarkan pertimbangan rasional dan wawasan nasionalisme.

Selain keuntungan elektoral politik identitas yang dimainkan oleh partai politik dan pendukung menyebabkan pembelahan di tengah masyarakat yang beragam secara etnik dan agama. Kekhawatiran terjadinya pembelahan dan berujung pada konflik politik di berbagai daerah, tidak terkecuali di Kota Mataram. Potensi distabilitas politik negara akibat politik identitas menjadi perhatian semua pihak serta kontributif bagi perkembangan kajian dalam ilmu politik.

Kota Mataram adalah salah satu daerah yang dapat mereplikasi keberbagaian agama dan etnik di Indonesia. Total populasi di Kota Mataram pada sensus penduduk tahun 2010 adalah berdasarkan data Badan Pusat Statisti tahun 2010 mencapai 402.843 dengan penyebaran agama yang di dominasi oleh agama islam 82.48%, Budha 0.98%, Hindu 13.98%, Kristen Katolik 0.75%, Protestan 1.67%, dan Konghucu 0.01% (sensus 2010).). Dengan beragam suku diantaranya suku Sasak yang mendominasi suku yang ada di wilayah Kota Mataram, Sumbawa, Mbojo, Bali, Tionghoa, Melayu, dan Arab, yang tersebar di enam kecamatan Kota Mataram. Dengan fakta sosiologis tersebut, Kota Mataram

akan menjadi daerah pertarungan pasangan Ahyar-Mohan dan Salman-Jana Hamdiana untuk meraih suara pada Pilkada tahun 2015.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Politik Identitas di Kota Mataram (Studi Pemenangan Pasangan Ahyar Abduh-Mohan Roliskana Dalam Pilkada Kota Mataram Tahun 2015).**

1.2 Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah politik identitas dalam pemenangan pasangan Ahyar-Mohan pada Pilkada Kota Mataram Tahun 2015 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui politik identitas dalam pemenangan pasangan Ahyar-Mohan pada Pilkada Kota Mataram Tahun 2015 .

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini akan menjawab fenomena sosial-politik khususnya kemunculan politik identitas dalam perpolitikan lokal dan nasional demi memperkaya kajian ilmu politik.

2. Manfaat akademis

Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (S1) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

3. Manfaat Praktis

Penelitian ini untuk mengetahui strategi apa saja yang digunakan Partai politik dan koalisi dalam mengusung isu politik identitas untuk memenangkan pasangan Calon kepala daerah serta dapat menjadi masukan bagi pemilih agar memilih pemimpin (presiden dan kepala daerah) berdasarkan kapasitasnya..



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian agar penulis dapat memperkaya teori serta menemukan variable-variabel baru mengenai topik politik identitas. Selain itu penelitian terdahulu menjadi acuan dalam menemukan celah teori dari berbagai perbandingan teori sehingga peneliti dapat dengan mudah untuk menegaskan posisi penelitian. Dari penelitian terdahulu, peneliti menemukan beberapa hasil penelitian yang memiliki kaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Ada beberapa penelitian yang menjadi referensi untuk membantu memberikan informasi mengenai politik identitas dan akan menjadi bahan perbandingan penelitian. Penelitian-penelitian tersebut antara lain:

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul/Tahun	Metode	Kesimpulan	Persamaan	Perbedaan
	Fitri Hafsari Zainddin	<i>Pilkada dan Politik Identitas Multikulturalisme di Lawu Timur (Studi Terhadap Kemenangan Thoriq Husler dalam Pilkada Serentak 2015)</i> /Tahun 2017	Kualitatif	Pelaksanaan pilkada Luwu Timur tahun 2015 etnisitas tidak memainkan peranan penting karena sentimen etnis pemilih relatif kecil. Pemilih bisa menerima kehadiran kepala daerah yang berbeda dengan etnis di luar dirinya. Keadaan di lapangan ditemukan bahwa dalam proses Pilkada, masyarakat cenderung memilih	Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, kesamaan beberapa teori yaitu teori identitas, teori perilaku politik,	Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian ini yaitu tempat dan waktu penelitian, dimana penelitian ini secara khusus membahas mengenai

			melihat dari hasil kinerja dari calon dan sosok figur calon.	serta sama-sama mengenai keragaman etnis dalam Pilkada.	politik multikulturalisme etnik sedangkan penulis mengenai politik identitas etnis dan agama. Perbedaan antara penelitian ini dengan penulis terletak pada tempat dan waktu penelitian, salah satu teori yang digunakan yaitu teori hierarki, penelitian ini lebih berfokus pada pengaruh yang ditimbulkan oleh politik identitas sedangkan penulis membahas mengenai penggunaan politik identitas dan kontestasi politik.
Irfan Zharfandy	<i>Pengaruh politik identitas terhadap pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2013/Tahun 2016</i>	Kualitatif	Dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur di Sulawesi selatan di dasari oleh hierarkis (Patron-Klien), yang sangat berperan penting dalam politik identitas	Persamaan penelitian ini dengan penulis seperti metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif, teori yang digunakan seperti teori politik identitas, selain itu sama-sama membahas mengenai politik identitas dalam Pilkada.	Perbedaan antara penelitian ini dengan penulis terletak pada tempat dan waktu penelitian, salah satu teori yang digunakan yaitu teori hierarki, penelitian ini lebih berfokus pada pengaruh yang ditimbulkan oleh politik identitas sedangkan penulis membahas mengenai penggunaan politik identitas dan kontestasi politik.
Fikri Adrian	<i>Identitas etnik dalam pemilihan kepala daerah (studi pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2012/Tahun</i>	Kualitatif	Isu memiliki pengaruh besar terhadap perilaku politik masyarakat, isu-isu yang sangat sensitif bagi sebagian masyarakat	Persamaan penelitian ini terletak pada metode penelitiannya, teori yang digunakan	Perbedaan terletak pada tempat dan waktu penelitian mengenai penggunaan

	2013			seperti suku, agama, dan ras (SARA) sehingga masyarakat yang masih kental akan mudah di pengaruhi	seperti teori politik identitas dan sama-sama membahas adanya etnis yang berpengaruh dalam Pilkada	identitas etnis dalam pemilihan sedangkan penulis mengani penggunaan identitas etnis dan agama sebagai pemenangan pasangan calon dalam Pilkada.
Melinda Pratiwi	Adi	<i>Politik identitas dalam perspektif politisi Tionghoa Surabaya (Studi kasus di DPRD Kota Surabaya /Tahun 2017</i>	Kualitatif	Politik identitas dianggap sebagai hal yang lumrah dan masih dilakukan, refresentasi seorang politisi juga berpengaruh dalam mendukung sepang terjang dalam politik walaupun politisasi tersebut menemui adanya rasa ketidaknyamanan.	Persamaan penelitian ini dengan penulis terletak pada metode penelitian yang digunakan yaitu kualitaitif dan teori yang digunakan yaitu politik identitas.	Penelitian ini mengenai politik identitas yang terjadi dalam suatu lembaga pemerintaha n sedangkan penulis mengenai politik identitas dalam Pilkada.
Sonny		<i>Peta politik identitas di indonesia “studi terpilihnya KH. Ma’ruf Amin sebagai Cawapres bakal Capres inkumben Joko Widodo pada pilpres 2019/Tahun 2019</i>	Kualitatif	Politik identitas yang berkembang di Indeonesia saat ini menjadi ancaman terhadap keutuhan Bangsa dan Negara.	Persaman penelitian ini dengan penulis terletak pada politik identitas yang berkembang serta isu-isu yang ada pada pemilu yang di bangun oleh elit politik	Penelitian ini membahas mengeani politik identitas terpilihnya Cawapres KH. Ma’ruf Amin dalam pemilu 2019 sedangkan penulis mengani Politik Identitas Pilkada dalam pemenangan calon.

Tabel penelitian terdahulu di atas dapat dideskripsikan sebagai berikut:

Pertama, penelitian Fitri Hapsari Zainuddin tahun 2017, “*Pilkada dan Politik Identitas Multikulturalisme di Lawu Timur (studi terhadap kemenangan Thoriq Husler dalam Pilkada Serentak 2015)*.” Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Pilkada di Luwu Timur Tahun 2015, etnisitas tidak memainkan peran penting karena sentimen pemilih berdasarkan isu etnik relatif kecil. Terdapat beberapa persamaan dengan penulis seperti metode penelitian kualitatif serta teori yang digunakan untuk menelisik strategi pemenangan pemilu. Akan tetapi juga terdapat beberapa perbedaan seperti tempat dan waktu penelitian. Penelitian Hafsari mengangkat secara khusus tentang Pilkada dan politik multikulturalisme. Sedangkan penulis mengenai politik identitas dalam pemenangan Pilkada Kota Mataram tahun 2015.

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Irfan Zharfandy tahun 2016 mengenai “*Pengaruh Politik Identitas Terhadap Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013*”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pilkada Gubernur Sulawesi Selatan diwarnai oleh peran hierarkis (patron-klien) dimana faktor kekerabatan sebagai basis alasan pemilih dalam menentukan pilihannya. Terdapat beberapa kesamaan penelitian ini dengan penulis seperti metode penelitian kualitatif, salah satu teori yang digunakan, dan kesamaan sudut pandang mengenai adanya pengaruh politik identitas dalam pelaksanaan Pemilu. Namun terdapat juga beberapa perbedaan seperti lokasi dan waktu penelitian, serta arena kontestasi yaitu Pilkada Gubernur dan Pilkada Wali Kota.

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Fikri Adrian tahun 2013 mengenai “*identitas etnik dalam pemilihan kepala daerah (studi pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2012.*” Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Kesimpulan penelitian, dalam pemilihan Gubernur di DKI Jakarta isu SARA memiliki pengaruh besar terhadap perilaku politik masyarakat, sehingga masyarakat yang masih kental dengan atribut identitas tertentu sangat mudah untuk di pengaruhi. Terdapat beberapa persamaan dengan penulis seperti metode penelitian, teori yang digunakan. Terdapat beberapa perbedaan seperti tempat dan waktu penelitian serta arena kontestasi Pilkada Gubernur sedangkan penulis mengenai politik identitas agama dan etnis sebagai alat kontestasi politik dalam Pilkada Wali kota Tahun 2015.

Keempat, penelitian Melinda Adi Pratiwi tahun 2017 berjudul “ *Politik Identitas Dalam Perspektif Politisi Tioghoa Surabaya (Studi Kasus di DPRD Kota Surabaya)*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitiannya menegaskan bahwa dalam lembaga pemerintahan di DPRD Kota Surabaya politik identitas dianggap sebagai hal yang lumrah dan masih dilakukan untuk mendapatkan kekuasaan. Terdapat kesamaan dengan penulis seperti metode penelitian yang digunakan, teori politik identitas yang digunakan dalam penelitian. Terdapat beberapa perbedaan seperti tempat dan waktu penelitian dan penelitian ini lebih membahas adanya politik identitas dalam suatu lembaga pemerintahan sedangkan penulis mengenai adanya politik identitas dalam Pilkada.

Kelima, penelitian Sonny tahun 2019 mengenai “*Peta Politik Identitas Di Indonesia (Studi Terpilihnya KH. Makruf Amin Sebagai Cawapres Inkumben Joko*

Widodo pada Pilpres 2019)”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa dalam tahap pelaksanaan demokrasi di Indonesia politik identitas terus berkembang sampai saat ini menjadi ancaman terhadap keutuhan bangsa dan negara. Terdapat beberapa persamaan seperti metode penelitian yang digunakan, adanya pelaksanaan politik identitas dalam pelaksanaan demokrasi dan isu-isu identitas yang dibangun dalam mempengaruhi pemilih pada pemilu. Namun juga terdapat beberapa perbedaan seperti tempat dan waktu penelitian serta penelitian ini membahas mengenai kontestasi identitas dalam Pemilu Presiden sedangkan penulis mengenai kontestasi identitas dalam Pilkada.

2.2 Tinjauan Teoritik

2.2.1 Identitas

Identitas Menurut Jenkins (seperti dikutip Nasurillah, tesis, 2006:40) mengatakan :

Identitas merupakan bagian integral dari kehidupan sosial. Hanya dengan membedakan identitas kelompok yang berbeda bahwa orang dapat mengkategorikan kepada orang lain. Identitas pada awalnya berkembang sebagai hasil dari proses kategorisasi. Berdasarkan persamaan dan perbedaan dari masing-masing obyek. Ketika dilakukan dalam konteks sosial maka proses kategorisasi sosial (pengelompokkan masyarakat berdasarkan fitur-fitur yang dimiliki bersama oleh suatu kumpulan individu) akan terjadi dalam kondisi sang subjek (individu perilaku kategorisasi) sendiri berada dalam kategorisasi tersebut.

Menurut (Haralambos dan Holburn, *Sociology*, 5, 2000, 885) Identitas terbentuk atas dua faktor yaitu; *pertama*, faktor internal yang memaknai apa yang kita pikirkan tentang identitas kita sendiri dan *kedua*, faktor eksternal yang

memaknai bahwa bagaimana orang lain melihat kita dan bereaksi terhadap keberadaan kita.

Identitas selalu melekat pada setiap individu dan komunitas. Identitas merupakan karakteristik yang membedakan antara orang yang satu dengan orang yang lain supaya orang tersebut dapat dibedakan dengan yang lain. Identitas adalah pembeda antara suatu komunitas dengan komunitas lain. Identitas mencitrakan kepribadian seseorang, serta bisa menentukan posisi seseorang.

Menurut Widayanti (2009: 14-15) ada 3 pendekatan pembentukan identitas, yaitu :

- a. Primodialisme, adalah pendekatan yang menjelaskan bahwa identitas diperoleh secara alamiah dan turun temurun.
- b. Konstruktivisme, adalah pendekatan yang menjelaskan bahwa identitas sebagai sesuatu yang dibentuk dan hasil dari proses sosial yang kompleks. Identitas dapat terbentuk melalui ikatan-ikatan kultural dalam masyarakat.
- c. Instrumentalisme, adalah pendekatan yang menegaskan bahwa identitas merupakan sesuatu yang dikonstruksikan untuk kepentingan elit dan lebih menekankan pada aspek kekuasaan.

Selanjutnya, Richard Jenkins (dalam Haralambos dan Holburn, *Sociology*, 5, 2000: 927) menguraikan mengenai pendekatan identitas menurutnya adalah :

Identitas dibentuk dalam proses sosialisasi, melalui proses ini orang belajar untuk melihat dengan jelas membedakan kesamaan dan perbedaan sosial yang signifikan terutama diantara satu dengan yang lainnya. Mereka akan menemukan orang-orang yang memiliki identitas yang berbeda dengan dirinya. Ketika mereka menemukan dengan kelompok yang satu identitasnya maka pasti akan ada interaksi saling berbagi dan kebersamaan.

Teori di atas menjelaskan bahwa proses pembentukan identitas adalah sebuah proses yang berjalan secara sosial. Dan identitas menjadi penting bagi seseorang ataupun individu karena identitas memiliki dua fungsi yaitu: menentukan batas-batas diri (*egoboundaries*), dan menerjemahkan kenyataan

lingkungan kedalam kategori-kategori tertentu berdasarkan persepsi individu akan kesamaan karakteristik masing-masing elemen lingkungan tersebut.

Selanjutnya, Johnston, Larana dan Gusfied (1994:12-24) menyatakan bahwa identitas terbagi menjadi identitas individu dan identitas kolektif, yaitu :

a. Identitas Individu

Individu merupakan makhluk yang independen ke dalam dirinya. Identitas individu berkaitan dengan siapa dan diakui sebagai apa seseorang dalam Masyarakat terlepas dari ketergantungannya dengan orang lain. Ketika bergabung dalam suatu komunitas sosial, seseorang bisa memiliki satu bahkan lebih identitas individu. Identitas ini diperoleh sejak lahir melalui interaksi dengan sesamanya.

b. Identitas Kolektif

Identitas ini muncul akibat adanya interaksi yang terjadi antar individu di dalamnya. Identitas kolektif dinilai dari kesungguhan individu dalam menjalin kerjasama dan membangun kedekatan antar sesama.

Sedangkan Menurut Dwight (dalam Jhon dan Marijke 2013: 363) mengatakan pembentukan etnis terdiri dari :

a. Pendekatan peimordialisme

Pendekatan primordialisme secara umum memandang identitas etnis sebaga “bawaan-lahir” (*innate*) dan alamiah (*natural*) dalam konteks tertentu. Anthony Smith (1986) dalam Jhon (2013: 363), mengidentifikasi berbagai variasi primordialisme, termasuk *primordialisme esensial* dan *pimordialisme* kekerabatan.

b. Perspektif Situasional

Di pihak lain *perspektif situasional* (juga dikenal sebagai pendekatan konstruksionis atau *instrumentali*) mengemukakan bahwa identitas etnis dikonstruksi secara sosial. Dengan kata lain definisi kelompok, dan identifikasi batasan-batasannya, kerap kali dinegosiasikan dan direnegosiasikan dan bagaimana batasan-batasan ini didefinisikan akan bergantung pada situasi dan lingkungan spesifik yang dihadapi oleh tiap kelompok.

c. Pendekatan Instrumentalis

Pendekatan Instrumentalis lebih sinis dari pada konsep sederhana bahwa identitas adalah konstruksi sosial. Instrumentalis memandang terciptanya identitas adalah sebagai produk manipulasi simbol-simbol kebudayaan dan kekerabatan oleh para pelaku politik untuk mendapatkan keuntungan politik (Cohen 1974). Pendekatan ini memandang etnisitas sebagai hasil dari strategi politik biasanya untuk mencapai tujuan yang lain, seperti

kekuatan politik, akses ke sumber daya, dan meningkatkan status dan kekayaan.

2.2.2 Politik Identitas

Untuk memperjelas batasan kajian tentang politik identitas diperlukan pengelaborasi teori dari sejumlah pakar. Mengingat politik identitas merupakan fokus perhatian yang relatif baru dalam perkembangan politik di Indonesia, khususnya terkait dengan penggunaan simbol-simbol tertentu dalam pemilu dan Pilkada di Indonesia. Upaya-upaya elite politik untuk menyetengahkan isu-isu primordialisme mencakup identitas etnik dan agama sebagai alat memobilisasi dukungan politik marak terjadi. Sebagai instrumen elite politik dalam kemenangan kontestasi politik, pemanfaatan politik identitas justru kerap menimbulkan pembelahan tajam di tengah-tengah masyarakat. Alih-alih masyarakat menentukan pilihannya dalam pemilu berbasis visi-misi kandidat, politik identitas terus diproduksi di ruang publik oleh elit agar memperoleh dukungan elektoral.

Dalam kondisi alamiah, ikatan kolektivitas berbasis perbedaan etnik dan agama memang sesuatu yang bersifat esensial dan *given*. Tentu saja segala upaya untuk menyeragamkannya adalah bukan hanya tidak perlu, namun juga sia-sia. Proses internalisasi yang berlebihan disebabkan karena perbedaan cara pandang politik menyebabkan terjadinya potensi ketegangan serta konflik di tengah masyarakat.

Menurut Stuart Hall dalam Setyaningrum (2005), bahwa pembentukan identitas seseorang tidak dapat dilepaskan dari, *sense* (rasa/kesadaran) terhadap ikatan kolektivitasnya. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa, ikatan-ikatan

kolektif merupakan konsekuensi logis dari kesadaran pentingnya kategori-kategori persamaan sebagai pembentuk identitas.

Akan tetapi di sisi lain, ikatan kolektif dapat sebagai penegas bahwa seseorang memiliki berbagai persamaan dengan orang lain dan pada saat yang bersamaan identitas juga memformulasikan *otherness* (keberbedaan) atau sesuatu yang diluar persamaan-persamaan tersebut. Sehingga karakteristik identitas bukan hanya dibentuk oleh ikatan kolektif, melainkan juga oleh kategori-kategori pembeda (*categories of difference*).

Sementara Sosiawan (2014 : 236) menegaskan bahwa identitas adalah sebuah istilah serapan yang diturunkan dari bahasa Latin, yaitu dari kata *iden* yang artinya sama. Secara filosofis, konsep ini memiliki dua pengertian: 1) *singleness over time* dan; 2) *sameness amid difference*. Kedua konsep ini menunjukkan bahwa ada persamaan dan perbedaan sekaligus yang dikandung dalam pengertian identitas.

Menurut *Barker* dalam Sosiawan (2014 : 236), konsep identitas adalah “*it pertains to cultural descriptions of persons with which we emotionally identify and which concern sameness and difference, the personal and the social*”. *Barker* melanjutkan penjelasannya bahwa identitas itu tidak lain “*the discursive resources that form the material for identity formation are cultural in character*” “Identitas adalah sesuatu yang dibentuk dalam interaksi antar individu”.

Sejalan dengan itu, *Stuart Hall* (*The Question of Cultural Identity*, 1994 dalam *Wibowo*, 2014), identitas merupakan sesuatu yang secara aktual terbentuk melalui proses tidak sadar yang melampaui waktu, bukan kondisi yang terberi

begitu saja dalam kesadaran semenjak lahir. Identitas menyisakan ketidak lengkapan, selalu “dalam proses”, “sedang dibentuk”. Identitas juga menyangkut apa-apa saja yang membuat sekelompok orang menjadi berbeda dengan yang lainnya.

Politik identitas dibedakan secara tajam antara identitas politik (*political identity*) dengan politik identitas (*political of identity*) (Haboddin, Muhtar, 2012). *Political identity* merupakan konstruksi yang menentukan posisi kepentingan subjek di dalam ikatan suatu komunitas politik sedangkan *political of identity* mengacu pada mekanisme politik pengorganisasian identitas (baik identitas politik maupun identitas sosial) sebagai sumber dan sarana politik. Politik identitas diasaskan pada esensialisme strategis, dimana kita bertindak seolah-olah identitas merupakan entitas yang stabil demi tujuan politis dan praktikal tertentu.

Secara teoritis politik identitas menurut Lukmantoro adalah politis untuk mengedepankan kepentingan-kepentingan dari anggota-anggota suatu kelompok karena memiliki kesamaan identitas atau karakteristik, baik berbasiskan pada ras, etnisitas, jender, atau keagamaan. Politik identitas merupakan rumusan lain dari politik perbedaan. Politik Identitas merupakan tindakan politis dengan upaya-upaya penyaluran aspirasi untuk mempengaruhi kebijakan, penguasaan atas distribusi nilai-nilai yang dipandang berharga hingga tuntutan yang paling fundamental, yakni penentuan nasib sendiri atas dasar keprimordialan. Dalam format keetnisan, politik identitas tercermin mula dari upaya memasukan nilai-nilai kedalam peraturan daerah, memisahkan wilayah pemerintahan, keinginan mendaratkan otonomi khusus sampai dengan munculnya gerakan separatis.

Sementara dalam konteks keagamaan politik identitas terefleksikan dari beragam upaya untuk memasukan nilai-nilai keagamaan dalam proses pembuatan kebijakan, termasuk menggejalanya perda syariah, maupun upaya menjadikan sebuah kota identik dengan agama tertentu.

Sedangkan Cressida Heyes (2007) mendefinisikan politik identitas sebagai sebuah penandaan aktivitas politis. Sedangkan dalam pengertian yang lebih luas politik identitas berkepentingan dengan pembebasan dari situasi keterpinggiran yang secara spesifik mencangkup konstituensi (keanggotaan) dari kelompok dalam konteks yang lebih luas. Jika dicermati Politik identitas sebenarnya merupakan nama lain dari biopolitik yang berbicara tentang suatu kelompok yang diidentikkan oleh karakteristik biologis atau tujuan-tujuan biologisnya dari suatu titik pandang. Sebagai contoh adalah politik ras dan politik gender. Menurut Agnes Hellner (1994:4) politik identitas adalah gerakan politik yang focus perhatiannya pada perbedaan sebagai satu kategori politik utama. Politik identitas muncul atas kesadaran individu untuk mengelaborasi identitas partikular, dalam bentuk relasi dalam identitas primordial etnik dan agama.

Namun, dalam perjalanan berikutnya, politik identitas justru dibajak dan direngkuh oleh kelompok mayoritas untuk memanfaatkan dominasi kekuasaan. Penggunaan politik identitas untuk meraih kekuasaan, yang justru semakin mengeraskan perbedaan dan mendorong pertikaian itu, bukan berarti tidak menuai kritik tajam. Politik identitas seakan-akan meneguhkan adanya keutuhan yang bersifat esensialistik tentang keberadaan kelompok sosial tertentu berdasarkan identifikasi primordialitas.

Agnes Heller mendefinisikan politik identitas sebagai sebuah konsep dan gerakan politik yang focus perhatiannya pada perbedaan (*difference*) sebagai suatu kategori politik yang utama (Abdilah S, 2002: 16). Di dalam setiap komunitas, walaupun mereka berideologi dan memiliki tujuan bersama, tidak bisa dipungkiri bahwa di dalamnya terdapat berbagai macam individu yang memiliki kepribadian dan identitas masing-masing.

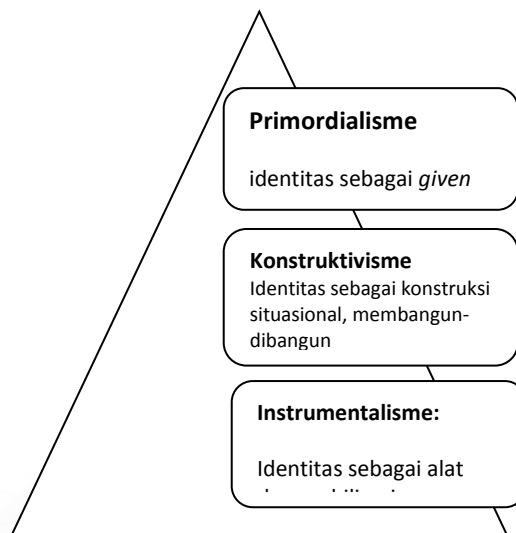
Jadi secara umum teori politik identitas dan berbagai hasil penelitian menunjukkan, ada dua factor pokok yang membuat etnis dan agama menjadi menarik dan muncul (*salient*) untuk dipakai dan berpengaruh dalam proses politik. Pertama, ketika etnis dan agama menjadi faktor yang dipertaruhkan. Ada semacam keperluan untuk mempertahankan atau membela identitas yang dimiliki suatu kelompok. Kedua, ketika proses politik tersebut berlangsung secara kompetitif. Artinya, proses politik itu menyebabkan kelompok-kelompok identitas saling berhadapan dan tidak ada yang dominan, sehingga tidak begitu jelas siapa yang akan menjadi pemenang sejak jauh-jauh hari. Pemilu, termasuk Pilkada, adalah proses politik di mana berbagai faktor seperti identitas menjadi pertaruhan. Tinggal sekarang bagaimana aktor-aktor yang terlibat di dalamnya mengelola isu-isu seperti etnis dan agama, menjadi hal yang masuk pertaruhan.

Agnes Haller mengambil definisi politik identitas sebagai konsep dan gerakan politik yang fokus perhatiannya adalah perbedaan (*difference*) sebagai suatu kategori politik yang utama. Setelah kegagalan narasi besar (*grand narrative*), ide perbedaan telah menjanjikan suatu kebebasan (*freedom*), toleransi dan kebebasan bermain (*free play*), meskipun kemudian ancaman baru muncul.

Politik perbedaan menjadi suatu nama baru dari politik identitas; rasisme (*race thinking*), biofeminisme dan perselisihan etnis menduduki tempat yang terlarang oleh gagasan besar lama. Berbagai bentuk baru intoleransi, praktek-praktek kekerasan pun muncul. Heller (1995: ix).

Selanjutnya Heller mendefinisikan politik identitas sebagai gerakan politik yang fokus perhatiannya lebih kepada perbedaan sebagai suatu kategori politik yang utama. Lebih lanjut, Kemala Chandakirana (1989) dalam artikelnya *Geertz dan Masalah Kesukuan*, menyebutkan bahwa: Politik identitas biasanya digunakan oleh para pemimpin sebagai retorika politik dengan sebutan kami bagi “orang asli” yang menghendaki kekuasaan dan mereka bagi “orang pendatang” yang harus melepaskan kekuasaan. Dengan demikian, politik identitas sekedar untuk dijadikan untuk menggalang politik guna memenuhi kepentingan ekonomi dan politiknya.

Terdapat beragam sudut pandang yang melihat fenomena politik identitas. Pierre Van Den Bergh (1991) maupun Ubed Abdilah (2002) menjelaskan tiga perspektif teoritis dalam mengkaji politik identitas yaitu: primordialisme, konstruktivisme, dan instrumentalisme.



Gambar. II.1 Pembagian paradigma melihat Politik Identitas

(Sumber : Pierre Van Den Bergh *Ethnicity and Nationalism: Theory and Comparison*. New Delhi: Sage Publication; 1991

Pedekatan pertama, argumentasi primordialisme yang melihat fenomena agama dalam kategori sosio-biologis. Pandangan ini berpandangan bahwa kelompok sosial dikarakteristikan oleh gambaran wilayah, agama, kebudayaan, bahasa dan organisasi sosial sebagai hal yang *given* dan tidak bisa dibantah. Secara konseptual, pandangan ini menekankan kehadiran identitas etnik dan agama primordial memiliki fungsi sebagai perekat sebuah komunitas. Secara definitif, para penganut paham primordialisme menekankan pada upaya pencapaian kepentingan kolektif dan kemampuan identitas kolektif untuk mendefinisikan dan mengartikulasi pandangan umum masa lalu dan saat ini. Sekaligus juga membentuk visi untuk masa depan.

Pendekatan primordial mengemukakan bahwa kepentingan individual anggota agama dibuat untuk menunjang kepentingan kelompok dan pimpinannya untuk memperkuat basis agama sebagai sumber kekuatan sosial. Namun, pendapat ini tidak bisa dipertahankan secara metodologis karena membatasi ruang tafsir dan

penerangan akan perubahan dari fenomena sosial yang terjadi secara waktu ke waktu. Seperti yang dilakukan oleh Max Weber yang menjelaskan etnisitas sebagai kumpulan orang yang menghibur kepercayaan subjektif dalam nyanyian mereka karena kesamaan-kesamaan fisik, agama, atau karena kenangan koloni dan migrasi.

Pendekatan kedua adalah konstruktivis yang dikembangkan oleh Frederik Barth. Teori ini memandang identitas agama dan budaya, sebagai hasil dari proses yang kompleks, manakala batas-batas simbolik terus dibangun dan membangun, oleh manfaat mitologi yang berlangsung melalui bahasa maupun pengalaman masa lampau.

Frederik Barth dalam Endang (2016) lebih jauh berargumentasi bahwa agama dan etnisitas mengalami perubahan terus-menerus dan bahwa batas keanggotaan suatu kelompok etnik sering dinegosiasikan dan dinegosiasikan kembali. Tergantung pada perjuangan politik di antara kelompok-kelompok yang ada. fenomena negosiasi identitas ini sebagai situational.

Pada batas ini, para aktor berupaya mengeksploitasi simbol-simbol budaya dan menampilkan perilaku etnik tertentu yang berubah-ubah dari waktu-kewaktu, sesuai situasi tertentu, atau sesuai dengan kepentingan pribadi atau sosial. Hal ini dianggap penting sebab sangat terkait dengan citra diri (*self image*) dan harga diri (*self esteem*) baik sebagai individu maupun kelompok. Identitas-identitas inilah yang akan selalu dialami, dikomunikasikan, diolah, ataupun dikonstruksi setiap individu dalam berinteraksi.

Sementara kalangan instrumentalisme lebih menaruh perhatian pada proses manipulasi dan mobilisasi politik. Menurut pandangan ini, manakala kelompok-kelompok sosial tersebut tersusun atas dasar atribut awal etnisitas seperti kebangsaan, agama, ras dan bahasa, maka pada saat tersebut, kelompok itu sedang melakukan mobilisasi kepentingan mereka. Kalangan Instrumentalisme menjelaskan bahwa identitas etnik dan agama senantiasa dijadikan sebagai sarana elit politik etnik dan agama memanipulasi identitas tersebut demi keuntungan mereka sendiri. Pandangan ini mengasumsikan bahwa mereka yang minoritas akan cenderung dijadikan sebagai alat untuk menguntungkan kelompok mayoritas

Brown (1989) dalam *Ethnic Revival: Perspectives on State and Society*, memberikan penjelasan etnisitas (agama) memang dapat dimanipulasi (instrumentalisme), namun juga secara luas etnisitas dalam hal ini agama diterima secara bawaan (primordial). Dalam berbagai sisi, pendekatan instrumentalis banyak mendapatkan kritik karena dianggap terlalu materialis dan tidak memperhitungkan hubungan positif keterkaitan primordial dari seseorang terhadap etnis/agamanya.

Namun, berbagai bukti empiris bahwa identitas primordial seringkali digunakan sebagai instrumen politik adalah sesuatu yang tidak bisa diabaikan begitu saja, karena hal ini terjadi dalam berbagai arena dan situasi politik. Berangkat dari hal tersebut, sudut pandang peneliti melihat bahwa politik identitas agama adalah proses konstruksi seperti pandangan Frederick Barth. Barth memandang bahwa identitas agama sebagai hasil dari proses yang kompleks

manakala batas-batas simbolik terus dibangun dan membangun oleh manfaat mitologi suatu hitungan sejarah untuk kepentingan situasional para elit politik.

Pada tahap selanjutnya, konstruksi identitas agama ini kemudian digunakan sebagai proses instrumentalisme. Tujuannya adalah sebagai alat untuk manipulasi dan mobilisasi sosial demi mengukuhkan atribut-atribut agama sebagai alat kekuasaan seperti penjelasan yang dikemukakan oleh David Brown.

Dalam menentukan politik identitas, menurut Castells (2003 : 7) harus lebih dahulu dilakukan identifikasi bagaimana konstruksi sebuah identitas muncul yang menurutnya bisa dilihat dengan 3 model bentuk identitas, yaitu :

- a. *Legitimizing identity* atau legitimasi identitas, yaitu identitas yang dibangun oleh institusi (penguasa) yang dominan ada dalam kehidupan sosial. Institusi ini menunjukkan dominasinya dengan melekatkan sebuah identitas tertentu pada seseorang atau kelompok.
- b. *Resistance identity* atau resistensi identitas, yaitu identitas yang dilekatkan oleh aktor-aktor sosial tertentu dimana pemberian identitas tersebut dilakukan dalam kondisi tertekan karena adanya dominasi hingga memunculkan satu resistensi dan membentuk identitas baru yang berbeda dari kebanyakan anggota komunitas sosial yang lain, konstruksi identitas inilah yang oleh Coulhoun dimaknai sebagai politik identitas.
- c. *Project identity* atau proyek identitas, konstruksi identitas pada model ini dilakukan oleh aktor sosial dari kelompok tertentu dengan tujuan membentuk identitas baru untuk bisa mencapai posisi tertentu dalam masyarakat, hal ini bisa terjadi sebagai implikasi dari gerakan sosial yang bisa merubah struktur sosial secara keseluruhan.

Sementara Cressida Heyes (2007) mendefinisikan politik identitas sebagai penandaan aktivitas politis dalam pengertian yang lebih luas dan teorisasi terhadap ditemukannya pengalaman ketidakadilan yang dialami oleh anggota-anggota dari kelompok-kelompok sosial tertentu.

Agnes Haller (1995) mendefinisikan politik identitas sebagai konsep dan gerakan politik yang akar perhatiannya adalah perbedaan (*difference*) sebagai

suatu kategori politik yang utama. Kemunculan politik identitas dalam dinamika politik yang sangat beragam di Indonesia tidak terlepas dari adanya rasa ketidakadilan dan persamaan hak yang diklaim oleh masing-masing kelompok atau golongan sosial tertentu. Selain itu, perbedaan yang menjadi tolak ukur utama dari keberagaman yang ada di Indonesia menjadikan politik identitas di Indonesia semakin mempertegas perbedaan tersebut. Pembiaran terhadap konflik yang dilatar belakangi oleh politik identitas yang beragam akan menciptakan ketidakstabilan negara.

2.2.3 Perilaku Pemilih

Perilaku politik bukanlah merupakan sesuatu hal yang berdiri sendiri. Namun perilaku politik seseorang itu dipengaruhi faktor-faktor internal dan eksternal yang berasal dari lingkungan sekitarnya. Faktor-faktor tersebut dapat berupa keadaan alam, kebudayaan masyarakat setempat, tingkat pendidikan, dan lain-lain.

Menurut Surbakti (1999:130) perilaku politik adalah tindakan atau kegiatan seseorang atau kelompok dalam kegiatan politik. Ramlan Surbakti mengemukakan bahwa perilaku politik adalah sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan keputusan politik. Perilaku politik merupakan salah satu unsur atau aspek perilaku secara umum. Perilaku politik meliputi tanggapan internal seperti persepsi, sikap, orientasi dan keyakinan serta tindakan-tindakan nyata seperti pemberian suara, protes, lobi, dan sebagainya. Persepsi politik berkaitan dengan gambaran suatu obyek tertentu, baik mengenai keterangan,

informasi dari sesuatu hal, maupun gambaran tentang obyek atau situasi politik dengan cara tertentu.

Menurut Surbakti (1999:130) ada beberapa faktor yang berpengaruh dalam proses partisipasi politik, diantaranya adalah :

- a. Jenis kultur politik atau bentuk nilai dan keyakinan tergantung kegiatan politik yang mempengaruhinya. Terkadang kultur politik mendorong seseorang untuk berpartisipasi secara aktif, tetapi terkadang justru menjadikan seseorang buta politik, seperti kultur yang banyak digambarkan oleh rakyat di desa-desa yang ada di Mesir. Misalnya ungkapan, *“yang penting bisa makan, sambil menunggu ajal.”*
- b. Karakter lingkungan politik. Dalam masyarakat yang menghormati supremasi hukum dan kebebasan politik, sistem politiknya bersifat multipartai, mengakui hak kritik dan partisipasi rakyat, dan banyak memberi kesempatan kepada anggota masyarakatnya untuk melakukan partisipasi dalam kehidupan bernegara. Demikian pula keberadaan partai-partai dengan segala ragamnya, juga berarti jaminan atas adanya oposisi yang institusional yang dengannya mereka melakukan partisipasi politik dan ikut mengambil keputusan. Artinya, ideologi dan sistem politik masyarakat memberikan pengaruh besar kepada partisipasi warganya.
- c. Faktor Personal
 - 1) Tingkat partisipasi warga dalam aktifitas politik tergantung, terutama kepada tingkat perhatiannya. Maksudnya, tergantung kepada motivasi yang dimilikinya dalam berpartisipasi politik. Dorongan-dorongan

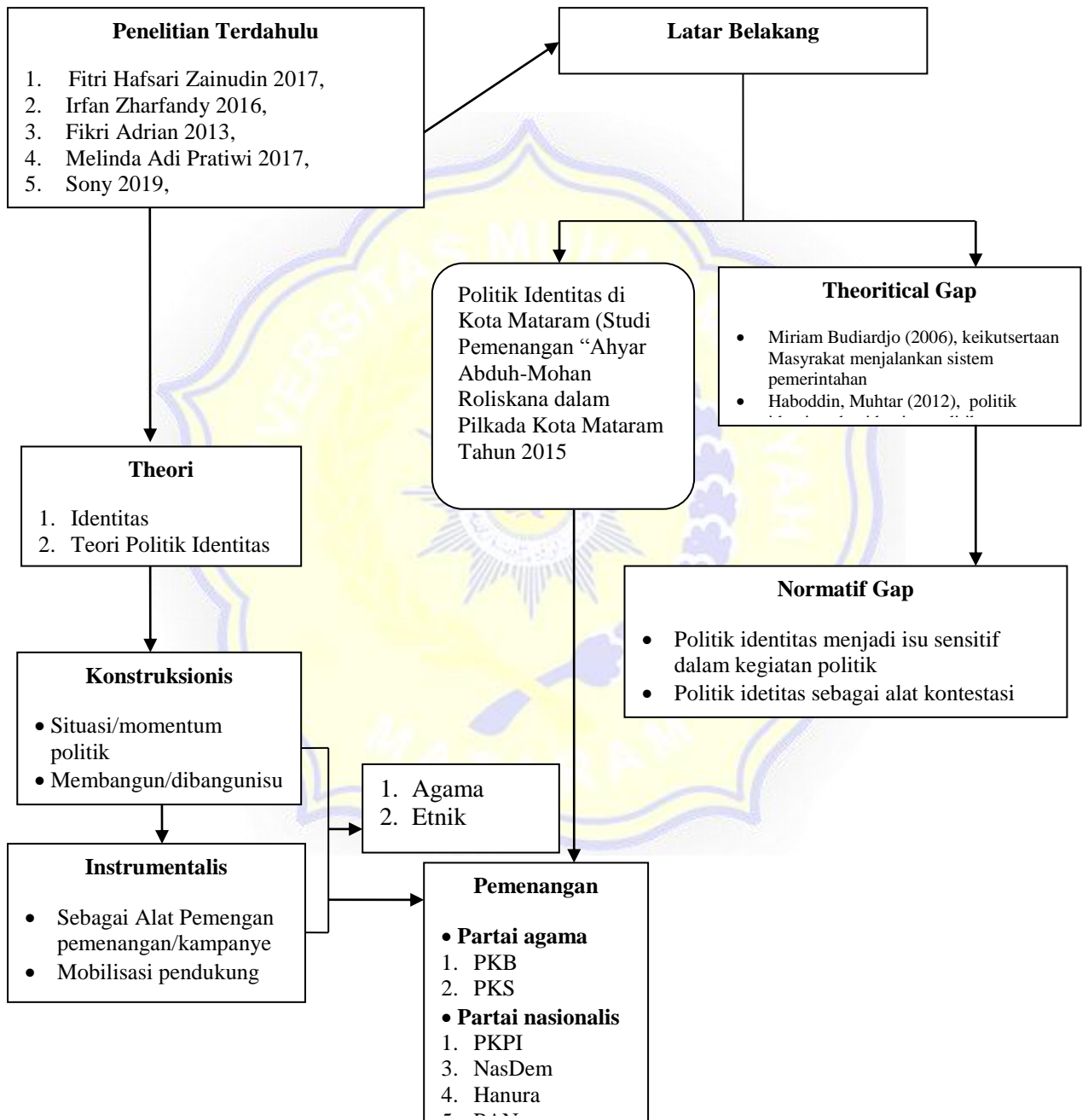
positif yang mengantarkan seseorang kepada aktivitas politik dapat terwujud melalui: media-media komunikasi politik, seperti membaca koran dan diskusi-diskusi informal.

- 2) Partisipasi politik juga tergantung kepada tingkat kemampuan dan kecakapan yang dimiliki individu. Misalnya untuk memikul tanggung jawab, mengambil keputusan, kemampuan untuk memilih dan kesadaran politik yang kritis, juga berorientasi kepada pelayanan lingkungan dan minat untuk memecahkan problematikanya.
- 3) Keyakinan individu akan kemampuannya dalam mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah merupakan dorongan psikologi untuk berpartisipasi.



2.3 Kerangka Pemikiran

Gambar. II.2
Kerangka Pikir



Sumber : Pierre Van Den Berg (1991)

2.4 Definisi Konseptual

1. Identitas berasal dari bahasa Inggris “*identity*” yang mempunyai arti ciri-ciri, tanda-tanda atau jati diri. Ciri-ciri ini dapat berupa ciri-ciri fisik maupun nonfisik. Sebagai jati diri, identitas memiliki dua pengertian. *Pertama*, merujuk pada sesuatu yang melekat dalam diri seseorang. *Kedua*, merupakan surat keterangan atau riwayat hidup seseorang.
2. Identitas merupakan karakteristik yang membedakan antara orang yang satu dengan orang yang lain supaya orang tersebut dapat dibedakan dengan yang lain. Identitas adalah pembeda antara suatu komunitas dengan komunitas lain. Identitas mencitrakan kepribadian seseorang, serta bisa menentukan posisi seseorang.
3. Politik identitas merupakan sesuatu yang bersifat hidup atau ada dalam setiap etnis, di mana keberadaannya bersifat laten dan potensial, dan sewaktu-waktu dapat muncul ke permukaan sebagai kekuatan politik yang dominan. Secara empiris politik identitas merupakan aktualisasi partisipasi politik yang terkonstruksi dari akar budaya masyarakat setempat, dan mengalami proses internalisasi secara terus-menerus di dalam kebudayaan masyarakatnya dalam suatu jalinan interaksi sosial.
4. Politik identitas adalah upaya untuk mencapai kekuasaan tertentu dalam kehidupan dan panggung politik, dimana pengakuan dan keberadaan wakil-wakil dari kelompok etnis merupakan bagian penting dari perjuangan politik yang dilakukan demi kepentingan kelompok etnisnya.

2.5 Definisi Operasional

Tabel II.2
Definisi Oprasional

No	Variabel	Indikator	Aspek
1	Konstruktivisme Politik Identitas	Penegasan Pilkada sebagai panggung pertarungan agama dan etnik	1. Pilkada sebagai panggung pertarungan agama dan etnik 2. Masa kampanye Pilkada sebagai momentum artikulasi isu agama dan etnik
		Upaya membangun/dibangunnya politik identitas; agama dan etnik	1. Produksi symbol 2. Alat peraga kampanye 3. Iklan di media massa 4. Media online 5. Bahan kampanye akbar
2	Instrumentalis Politik Identitas	Agama dan etnik menjadi alat pemenangan Pilkada melalui kampanye	1. Simbol 2. Alat peraga kampanye 3. Iklan di media massa 4. Media online 5. Bahan kampanye akbar
		Agama dan etnik dimanfaatkan untuk memobilisasi dukungan untuk pemenangan	1. Bahasa 2. Media massa 3. Media online 4. iklan kampanye

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara deduktif mulai dari tema-tema yang umum ke tema-tema yang khusus, dan menafsirkan makna data. Laporan akhir untuk penelitian ini memiliki struktur atau kerangka yang fleksibel. Siapapun yang terlibat dalam bentuk penelitian ini harus menerapkan cara pandang penelitian yang bergaya induktif, berfokus terhadap makna individual, dan menerjemahkan kompleksitas suatu persoalan (Nana Syaodih, 2006:60).

Metode penelitian kualitatif bertujuan untuk menghasilkan temuan atau kebenaran yang mendalam sehingga menghasilkan temuan data yang real sesuai dengan fakta yang terdapat di lapangan serta bersumber dari berbagai faktor yang mempengaruhi data tersebut yang sesuai dengan konteks kebenaran.

3.2 Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di wilayah Kota Mataram. Dimana lokasi pengambilan data yaitu masyarakat umum Kota Mataram, Partai PKS dan Partai Golkar. Alasannya Penulis memilih Kota Mataram sebagai lokasi penelitian karena Kota Mataram adalah daerah yang terdapat etnik dan agama yang beranekaragam dan partai merupakan wadah elit politik dalam proses memenangkan Pilkada.

3.3 Jenis Data

3.3.1 Data Primer

Data Primer yaitu bahan yang sifatnya mengikat seperti hasil wawancara, penulis telah mendatangi setiap rumah informan dimanapun berada dan melakukan wawancara secara *face to face* untuk mendapatkan hasil yang valid dari informan secara langsung sehingga dalam menggambarkan hasil penelitian akan lebih mudah. Selain melakukan wawancara penulis juga telah melakukan observasi di kota Mataram serta telah melakukan pengamatan di lingkungan masyarakat.

Tabel III.1
Unit Analisa Data Primer

No.	Jenis Data	Nama Narasumber	Fraksi	Metode Pengumpulan Data
1.	Penegasan Pilkada sebagai panggung pertarungan agama dan etnik	1. Muhammad Ahyar 2. Jana Hamdiana	1. Partai PKS 2. Partai Golkar	1. Wawancara mendalam
2.	Upaya membangun/dibangunnya politik identitas; agama dan etnik	1. Muhammad Ahyar 2. Jana Hamdiana 3. Hariyatul Aini 4. Nurul Hidayani	1. Partai PKS 2. Partai Golkar 3. Masyarakat Umum 4. Masyarakat Umum	1. Wawancara mendalam
3.	Agama dan etnik menjadi alat pemenangan Pilkada melalui kampanye	1. Muhammad Ahyar 2. Jana Hamdiana 3. Hariyatul Aini 4. Nurul Hidayani	1. Partai PKS 2. Partai Golkar 3. Masyarakat Umum 4. Masyarakat Umum	1. Wawancara mendalam
4.	Agama dan etnik dimanfaatkan untuk memobilisasi dukungan untuk pemenangan	1. Muhammad Ahyar 2. Jana Hamdiana 3. Hariyatul Aini 4. Nurul Hidayani	1. Partai PKS 2. Partai Golkar 3. Masyarakat Umum 4. Masyarakat Umum	1. Wawancara mendalam

3.3.2 Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang sudah tersedia berupa kepustakaan dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sebagaimana penulis telah melakukan telah pustaka dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber yang berkaitan erat dengan masalah Politik identitas Pilkada serentak Kota Mataram tahun 2015 yang telah penulis dapatkan dari arsip-arsip seperti buku, jurnal, internet dan sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian (Sanapiah Faisal, 2005:22).

Tabel III.2
Unit Analisis Data Sekunder

No.	Jenis Data	Nama Data	Sumbe Data
1.	1. Penegasan Pilkada sebagai panggung pertarungan agama dan etnik	1. Unggahan Meme Ajakan Memilih Pasangan Ahyar-Mohan Menggunakan Bahasa Sasak	1. Facebook Relawan AMAN
	1. Upaya membangun/dibangunnya politik identitas agama dan etnik	1. Pernyataan dalam bentuk status oleh relawan AMAN menggunakan #MentaramAMAN 2. Potongan gambar video klip kampanye yang berjudul Ahyar-mohan berlatang belakang agama dan etnik	1. Facebook Relawan AMAN 2. Youtube Daun Hijau
2.	1. Agama dan etnik menjadi alat pemenangan pilpres melalui kampanye	1. Baju dukungan pasangan ahyar-mohan sentimen agama dan etnik	1. Facebook relawan AMAN
	2. Agama dan etnik dimanfaatkan untuk memobilisasi dukungan untuk pemenangan	1. Potongan gambar video klip kampanye yang berjudul matur tampiasih berlatang belakang etnis dan agama	1. Youtube Daun Hijau

3.4 Teknik Penentuan Narasumber

Cara menentukan narasumber dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *purpose sampling*. Yakni salah satu teknik pengambilan sampel secara sengaja dengan teknik pemilihan informan yang sesuai dengan keinginan peneliti karena sudah mengetahui mengenai lokasi dan objek penelitian.

Menurut Ruslan teknik *purpose sampling* adalah pemilihan informan berdasarkan pada karakteristik tertentu yang dianggap mempunyai sangkut pautnya dengan karakteristik populasi yang sudah diketahui sebelumnya.

Sedangkan menurut (Sugiyono, 2012:218) dalam penelitian kualitatif terdapat informan, yaitu orang yang dapat memberikan gambaran, pemahaman tentang objek penelitian.

Pemilihan informan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada asas subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data, dan bersedia memberikan informasi lengkap dan akurat. Informa yang bertindak sebagai sumber data dan informasi harus memenuhi syarat, yang akan menjadi informan(*key informan*) dalam penelitian ini adalah orang yang sangat paham mengenai strategi pemenangan Pilkada baik dari pasangan calon maupun partai politik sedangkan informan biasa adalah masyarakat umum yang menggunakan hak pilihnya dan dianggap mampu memahami permasalahan yang akan di teliti.

Adapun kriteria-kriteria penentuan informan kunci (*key informan*) yang tepat, dalam pemberian informasi dan data yang tepat dan akurat mengenai pelaksanaan Pilkada Kota Mataram tahun 2015 adalah sebagai berikut:

- a. Dewan Pemenangan Partai Agama (Partai PKS)
- b. Dewan Pemenangan Partai Nasionalis (Partai Golkar)

Selanjutnya adapun kriteria-kriteria penentuan Informan biasa yang tepat, dalam pemberian informasi dan data yang tepat dan akurat mengenai pelaksanaan Pilkada Kota Mataram tahun 2015 adalah sebagai berikut:

- a. Pemilih Ahyar-Mohan (masyarakat 2 orang)

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini sebagai berikut:

3.4.1 Observasi

Observasi atau pengamatan dapat diartikan sebagai perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala, atau sesuatu. Peneliti harus mendapatkan sendiri

informasi atau data melalui pengamatan terhadap gejala-gejalanya secara sendiri, atau melalui pengamatan terhadap orang lain yang sudah dilatih peneliti terlebih dahulu untuk tujuan tersebut. Penggunaan teknik observasi ini dimaksudkan untuk mengungkap fenomena yang tidak diperoleh melalui wawancara (Emzir, 2014:37-38).

3.4.2 Wawancara

Wawancara adalah pertemuan antara peneliti dan informan, dimana jawaban informan akan menjadi data mentah. Secara khusus, wawancara juga merupakan metode bagus untuk pengumpulan data tentang subjek kontemporer yang belum dikaji secara ekstensif dan tidak banyak literature yang membahasnya. Wawancara dilakukan dengan mengikuti petunjuk pedoman wawancara yang sebelumnya telah dibuat oleh peneliti.

Namun disini peneliti melakukan wawancara secara mendalam, ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang kompleks, yang sebagian besar berisi pendapat, sikap, dan pengalaman pribadi (Sugiyono, 2013:230).

3.4.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah laporan yang dilakukan bisa secara tertulis, dengan gambar yang berisikan dari penjelasan data dokumentasi juga merupakan bentuk dari pemberian ataupun pengumpulan bukti-bukti dan keterangan (seperti kutipan dari surat kabar dan gambar-gambar).

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah karna dengan analisis, data tersebut dapat berarti dan bermakna dalam

memecahkan masalah penelitian (Sugiyono, 2012). Untuk menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian ini, digunakan teknik analisis data kualitatif

Tahapan analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Reduksi data. Reduksi data merupakan penyerderhanaan yang dilakukan melalui seleksi, pemfokusan dan keabsahan data mentah menjadi informasi yang bermakna, sehingga memudahkan penarikan kesimpulan.
- b. Penyajian data Penyajian data yang sering digunakan pada data kualitatif adalah bentuk naratif. Penyajian-penyajian data berupa sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis dan mudah dipahami.
- c. Penarikan kesimpulan Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengaju pada rumusan masalah secara tujuan yang hendak dicapai. Data yang telah disusun dibandingkan antara satu dengan yang lain untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada